



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 April 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas progres terkait : a. Design Program dan tata kelola program jaminan sosial ketenagakerjaan b. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan c. Operasional Program Jaminan Pensiun Pekerja sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial. 2. Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam pendataan peserta BPJS termasuk peserta Tenaga Kerja Asing dan upaya menghadapi kendala kedepan.
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI B. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan program bantuan kesejahteraan antara lain bantuan beasiswa kepada putra/putri peserta yang mengalami kecelakaan kerja, bantuan uang muka perumahan, bantuan program rusunawa serta bantuan iuran kepada pekerja yang tidak mampu, anak terlantar dan fakir miskin sesuai dengan amanat Pasal 34 UUD NRI 1945.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk:
 - a. mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi termasuk pengawasan dari roadmap operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015.
 - b. mengembangkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, investasi rumah susun sederhana sewa, toko swalayan, transportasi sehingga manfaat investasi yang dilakukan lebih berpihak kepada peserta/buruh.
 - c. mengusulkan besaran iuran yang proporsional dan manfaat jaminan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan peserta, perusahaan dan keberlangsungan program Jaminan Sosial.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi program jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian termasuk persepsi BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan, pekerja formal dan informal termasuk guru honorer, usaha kecil, usaha mikro dalam rangka meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan program jaminan sosial termasuk review program dan investasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program bantuan iuran melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada petani, pekerja miskin dan nelayan.
6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan hasil investasi termasuk jenis-jenis investasi dan pengembangannya serta pengembalian investasi kepada peserta yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Disampaikan selambat-lambatnya 13 April 2015.

Rapat diakhiri pukul 13.35 WIB.

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



ELVYN G.MASASSYA